



POLITEA Jurnal Pemikiran Politik Islam

ISSN : 2621-0312

e-ISSN : 2657-1560

Vol. 2 No. 1 Tahun 2019

Doi : 10.21043/politea.v2i1.4976

<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/politea>

Figur Pemimpin Ideal dalam Islam Perspektif Dosen IAIN Kudus

Rochanah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus, Jawa Tengah

hana@stainkudus.ac.id

Abstract

The Ideal Leader of Islam in the Perspective of IAIN Kudus Lecturers. This research is a research with a qualitative approach through descriptive-analytical methods. The technique of collecting data through observation, interviews and documentation. The urgency of this study is to find out more about how ideal leaders in Islam are in the view of academics (lecturers) who should have enough observant and critical thinking in choosing a leader. The problem that the researchers raised in this study was; how is the ideal leader figure in Islam the perspective of the IAIN Kudus lecturer? The results showed that the ideal leader figure in Islam was the perspective of the IAIN Kudus lecturer as a trustworthy leader, a fair leader, a leader who promoted deliberation (shura), a leader who enforced *amr ma'ruf nahi munkar*, protecting the people, a leader who provided employment, leaders who pay attention to the welfare of honorary teachers, wise leaders regarding the rules of finger print.

Keywords: Ideal Leaders, Islam, Lecturers of IAIN Kudus

Pendahuluan

Kepemimpinan merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa dielakkan. Hal ini karena sosok pemimpin dalam suatu kelompok masyarakat, baik skala kecil ataupun besar, memang dibutuhkan kehadirannya. Tanpa kehadiran seorang pemimpin, maka perkumpulan suatu masyarakat tidak bisa tertata, tidak teratur, sehingga akan menimbulkan kekacauan. Oleh karenanya, kehadiran pemimpin adalah “wajib” adanya, sebagaimana perhatian agama Islam terhadap figur pemimpin.

Salah satu kebutuhan dasar dalam diri manusia adalah agama. Agama dan kehidupan sosial keduanya saling berinteraksi antara satu dengan yang lain, karenanya keduanya menyatu. Agama juga tidak hanya membahas tentang ritual semata melainkan juga berbicara tentang nilai-nilai yang harus dikondisikan dalam kehidupan sosial, yakni dalam urusan ketatanegaraan, sehingga muncul tuntutan agar nilai-nilai agama diterapkan dalam kehidupan bernegara (Sholikin, 2012, p. 195).

Islam merupakan agama universal yang mengatur segala urusan manusia (*syumuliyah*). Kandungan ajaran-ajaran dasar yang diberlakukan bagi seluruh umat manusia di manapun dan kapan pun. Mengatur urusan yang tidak hanya berhubungan dengan urusan akhirat semata. Islam juga bukan agama yang hanya sekedar memprioritaskan aspek legal formal tanpa mementingkan aspek moral. Sifat *syumuliyah* dalam agama Islam bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan seluruh umat manusia sehingga umat Islam diwajibkan untuk mematuhi seluruh aturan tersebut (Ghazali & Gunawan, 2015, p. 25). Karena sifat *syumuliyah* yang dimiliki agama Islam, maka urusan politik menjadi salah satu bidang yang diatur dalam agama Islam.

Allah mengutus Nabi Muhammad Saw. sebagai rahmat bagi seluruh alam (*rahmat lil alamin*). Sebagaimana tercantum dalam surat al Anbiya ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

"Dan tidaklah Kami mengutusmu (Muhammad) kecuali untuk menjadi rahmat bagi alam semesta". (Q.S. 21:107)

Juga terdapat dalam surat Saba' ayat 28:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

"Dan tidaklah Kami mengutusmu (Muhammad) kecuali untuk menjadi Rasul bagi seluruh manusia, membawa kabar gembira dan memberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." (Q.S. 34:28)

Nabi Muhammad Saw sebagai nabi terakhir telah mencontohkan kepemimpinan politik yang sempurna dengan tujuan menyebarkan agama yang hak kepada seluruh umat. Bidang politik yang diajarkan Nabi Muhammad pada saat itu berdampak positif bagi kemaslahatan seluruh umat. Namun demikian, umat Islam tidak diharuskan mencontoh pola pemerintahan Islam klasik pada masa dahulu, melainkan memiliki kebebasan penuh untuk memilih sistem pemerintahan yang memajukan (Syaminan, 2009, p. 4).

Agama Islam sebagai *rahmat lil alamin* memiliki karakter khusus dalam berbagai bidang, diantaranya adalah dalam bidang politik. Islam bukanlah suatu agama yang hanya mementingkan urusan spiritual, melainkan juga memiliki perhatian yang besar dalam urusan politik (*siyasah*). Artinya, agama Islam tidak hanya mengatur permasalahan yang berhubungan dengan akhirat

semata, seperti surga dan neraka, namun juga memberikan perhatian yang besar dalam urusan keduniaan, yakni dalam bidang politik.

Umat muslim yang taat akan mewajibkan dirinya untuk meyakini urusan aqidah dan urusan politik. Keduanya memiliki manfaat yang besar bagi manusia. Urusan aqidah memberikan manfaat untuk kebaikan di akhirat, dan urusan politik memberikan manfaat untuk kebaikan di dunia. Oleh karenanya, antara urusan akidah dan politik keduanya harus dijalankan secara seimbang oleh manusia.

Mengenai urusan politik/kepemimpinan, hal ini sebagaimana tercantum dalam surat An Nisa ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An Nisa [4]: 59)

Selain terdapat pada surat An Nisa ayat 59, ketaatan pada ulil amri juga tercantum dalam hadits berikut, yang artinya:

Dari Ibnu Umar ra, dari Nabi Saw, beliau bersabda: “seorang muslim wajib mendengarkan dan taat terhadap perintah yang disukainya maupun yang tidak. Kecuali bila ia diperintahkan mengerjakan kemaksiatan, maka ia tidak wajib mendengar dan taat. (HR. Bukhari dan Muslim) (Nawawi, 1999: 611)

Berdasarkan ayat dan hadits tersebut di atas dapat kita pahami bahwa kaum muslimin yang beriman diperintahkan untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah, serta menjauhi larangan Allah dan Rasulullah. Ketaatan kepada Allah dan Rasulullah dibuktikan dengan mengikuti kebenaran yang dibawaNya, yakni dengan ketaatan pada penguasa yang tidak bermaksiat kepada Allah yakni penguasa yang mengembalikan segala persoalan kepada Al Qur'an dan Hadits manakala terdapat perselisihan paham dan pendapat. Dengan mengembalikan segala persoalan kepada Al Qur'an dan Hadits, maka sudah dipastikan keputusan yang di dapat adalah keputusan yang terbaik yang berguna bagi kemaslahatan umat banyak (Ghazali & Gunawan, 2015, p. 37).

Pada ayat tersebut mengajarkan kepada kita untuk mentaati *ulil amri*, yakni ketaatan kepada seorang pemimpin, dalam hal ini adalah pemimpin negara. Ketaatan yang dianjurkan dalam agama Islam bukanlah ketaatan buta, melainkan ketaatan yang bersifat kritis, yakni menggunakan tolak ukur kebenaran yang datang dari Tuhan. Ketaatan kritis adalah ketaatan kepada sosok pemimpin yang berpegang teguh pada tuntunan Allah dan Rasulnya. Pemimpin dengan figur tersebut boleh

untuk kita taati. Adapun pemimpin yang tidak berpegang teguh kepada tuntunan Allah dan Rasulnya, maka tidak wajib bagi kita untuk mentaatinya. Dan disini rakyat diperbolehkan untuk mengkritik atau mengembalikan ke jalan yang benar (Nata, 2014, p. 92).

Sebagai seorang penguasa, maka wajib hukumnya untuk berbuat adil kepada rakyat, yakni adil dalam memutuskan hukum sehingga tidak seperti pisau yang tumpul ke atas namun tajam ke bawah. Sebagai penguasa juga harus menghindari sikap semena-mena, dzalim, dan sombong. Sebagai penguasa harus menyadari betul bahwa apa yang dicapainya saat itu hanyalah titipan Allah yang sewaktu-waktu bisa diambilNya (Ghazali & Gunawan, 2015, p. 38).

Dari sini dapat peneliti simpulkan bahwa kita hanya diperbolehkan taat kepada pemimpin yang berpegang teguh pada tuntunan Allah dan Rasulnya, dan tidak diperkenankan taat kepada pemimpin yang tidak berpegang teguh kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga manakala pemimpin bertindak dzalim kepada rakyatnya, maka kita sebagai rakyat bisa mengajukan aspirasinya melalui wakil rakyat yang akan melanjutkannya ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu DPR, untuk kemudian disampaikan kepada MPR.

Di Indonesia bentuk pemerintahannya adalah Republik dan dipimpin oleh seorang Presiden. Pemerintah/ negara tugasnya adalah mengatur urusan rakyat. Sedangkan tugas rakyat adalah mengontrol dan mengawasi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Fungsi utama terbentuknya pemerintahan adalah sebagai alat dalam menegakkan kebenaran, keadilan, kesejahteraan, keamanan dan ketenteraman bagi rakyat. Selanjutnya urusan tersebut masuk dalam urusan politik.

Politik secara etimologis berasal dari kata *sasa-yasusu-siyasat (an)* yang artinya mengurus kepentingan seseorang. Artinya, dalam suatu aktivitas politik, di dalamnya terdapat suatu pengaturan yang berkaitan dengan urusan rakyat yang dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan perintah dan larangan. Adapun politik Islam dimaknai sebagai pengaturan urusan umat yang berlandaskan pada aturan yang berlaku dalam agama Islam.

"Seseorang yang ditetapkan oleh Allah untuk mengurus kepentingan umat, tetapi dia tidak memberikan nasihat kepada mereka, tidaklah akan mencium bau surga.(HR al-Bukhari dari Ma'qil bin Yasar ra.)

"Tidaklah seorang hamba yang ditetapkan oleh Allah untuk mengurus rakyat, lalu Mati dalam keadaan menipu mereka, kecuali Allah akan mengharamkan dirinya masuk ke dalam surga.(HR al-Bukhari dan Muslim dari Ma'qil bin Yasar ra.)

Dalil tersebut diatas menunjukkan bahwa urusan politik adalah urusan yang diprioritaskan dalam agama Islam. Keterlibatan umat Islam dalam mengurus kepentingan rakyat dalam rangka menegakkan Islam menjadi kewajiban terbesar kaum muslim. Hal ini karena pengaturan urusan umat harus merujuk pada hukum Islam, hal tersebut agar terselenggaranya aktivitas politik yang sesuai dengan aturan Sang Khaliq, dan bukan berorientasi pada kekuasaan semata. Politik dalam Islam diselenggarakan dalam rangka menegakkan hukum Allah, sedangkan politik yang tidak berlandaskan Islam di dalamnya mengabaikan hukum Allah dan menerapkan hukum yang dibuat

oleh manusia. Dengan demikian, penerapan hukum Islam secara sempurna adalah kewajiban bagi setiap kaum muslim. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang bagaimana sosok pemimpin yang ideal dalam Islam dengan judul “Pimpinan Ideal dalam Islam Perspektif Dosen IAIN Kudus”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan dosen IAIN Kudus tentang perspektif pemimpin yang memiliki karakter dan kepribadian yang ideal dalam Islam yang dapat dijadikan panutan dalam memimpin negara. Penelitian ini lebih difokuskan kepada pandangan dosen sebagai kaum cendekiawan yang memiliki keilmuan yang dalam, wawasan yang tinggi, dan pemikiran yang kritis yang tentunya hal ini jauh berbeda dengan pandangan dan pemikiran kaum awam tentang bagaimana sosok pemimpin ideal dalam Islam. Disinilah letak keunikan dari tema penelitian yang peneliti lakukan.

Penelitian ini dianggap penting karena peneliti ingin mengetahui lebih dalam bagaimana sosok pemimpin ideal dalam Islam menurut pandangan para akademisi yang semestinya memiliki pemikiran yang cukup jeli dan kritis dalam memilih sosok pemimpin, hal ini tentunya berbeda dengan pemikiran kaum awam yang tidak mengenyam pendidikan tinggi.

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini adalah penelitian yang telah dilakukan oleh M. Syaminan dalam jurnal dengan judul “Analisa Pemikiran Politik Islam”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak masa Nabi Muhammad hingga masa Khulafaurrasyidin menunjukkan terdapatnya perbedaan dalam pemikiran politiknya, namun tetap tidak terlepas dari unsur musyawarah dalam mencapai mufakat. Adapun setelah masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah di dalamnya terjadi disintegrasi yaitu tidak adanya politik Islam. Hal tersebut menggambarkan hilangnya acuan politik Islam yang asasi yakni sumber ajaran Islam tidak lagi dijadikan sebagai acuan kenegaraan, melainkan mengacu pada kebijakan dan kehendak sultan (Syaminan, 2009).

Penelitian lain dilakukan oleh Muhammad Harfin Zuhdi dengan judul “Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: dalam penelitian tersebut mengkaji kepemimpinan dalam perspektif Islam dengan mengacu pada ayat-ayat yang terdapat di dalam al Qur’an. Dalam kepemimpinan perspektif Islam harus berlandaskan pada ayat-ayat al Qur’an agar tercipta suatu keadilan hukum, kemaslahatan umat dan tegaknya kebenaran. Untuk mewujudkan kesemuanya itu, maka patokannya adalah pada syariat Islam (Harfin Zuhdi, 2014, pp. 35–37).

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Muhammad Harfin Zuhdi, di dalamnya mengkaji kepemimpinan dalam perspektif Islam dengan mengkaji ayat-ayat al Qur’an yang berhubungan dengan kepemimpinan. Adapun dalam penelitian ini, peneliti mencoba mengkaji lebih dalam sosok Pemimpin ideal dalam Islam perspektif dosen IAIN Kudus. Jadi, selain mengacu pada apa yang telah ditetapkan dalam agama Islam, peneliti juga mengaitkannya dengan pandangan dosen selaku akademisi yang berkecimpung dalam dunia pendidikan.

Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara dan

observasi dilakukan kepada beberapa dosen IAIN Kudus. Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada dosen yang memiliki *passion* dalam bidang politik dan memiliki ketertarikan dalam mengamati bidang politik. Selain itu, wawancara juga dilakukan kepada dosen yang memiliki *passion* dalam bidang agama, hal ini untuk mengetahui pandangan politik dalam perspektif agama. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan semi terstruktur. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap perbincangan dalam keseharian. Adapun metode dokumentasi dilakukan dengan mencermati dan menganalisis Undang-undang terkait dengan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kepemimpinan.

Pembahasan

Siyasah adalah mengatur segala urusan umat dan bukan hanya berorientasi pada kekuasaan semata. Dalam urusan *siyasah* yang diprioritaskan adalah menegakkan hukum Allah di muka bumi untuk kemaslahatan ummat. Sehingga manusia yang menentang hukum yang telah ditetapkan Allah adalah menyalahi aturan ajaran Islam. Tujuan *siyasah* dalam agama Islam adalah sebagai ladang untuk kehidupan yang lebih baik di akhirat. Untuk mencapai kehidupan di akhirat yang lebih baik maka kehidupan di dunia harus diatur sebaik mungkin yakni dengan tetap tegaknya semua aturan diatas agama. Hal ini sejalan dengan tujuan *siyasah* dalam Islam yakni *iqamatud din (hirasatud din) wa siyasatud dunya* (menegakkan din dan mengatur urusan dunia).

Pemimpin yang Amanah

Amanah diartikan dengan sikap jujur dan kepercayaan. Amanah merupakan salah satu sifat wajib bagi Rasul. Amanah dalam suatu kepemimpinan dapat diartikan dengan menjaga kepercayaan, yakni kepercayaan yang telah diberikan dan dipasrahkan oleh rakyat kepada pemimpin, yakni presiden sebagai kepala negara. Memperoleh kedudukan menjadi seorang pemimpin merupakan tanggung jawab yang sangat besar. Kekuasaan yang diperoleh merupakan suatu bentuk pendelegasian kewenangan dari Allah. Karenanya, kekuasaan yang dimilikinya sebagai wujud amanah dari Allah yang sifatnya sementara, tidak selamanya. Dan kekuasaan tersebut yang nantinya harus dipertanggung jawabkan di hadapan Allah. Dalam menjalankan amanah yang telah diberikan oleh rakyat, maka harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan penuh kejujuran. Hal ini agar pemimpin dalam suatu negara tersebut dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya sehingga kemaslahatan rakyat akan tercapai.

Namun demikian, tidak semua pemimpin dalam suatu negara dapat memegang amanah yang telah diterimanya dikarenakan beratnya menjalankan amanah. Bahkan ada sosok pemimpin yang berbuat dzalim dan semena-mena kepada rakyat yang dipimpinnya demi mencapai kepentingan pribadinya. Hal ini sebagaimana tercantum dalam surat An Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (Q.S. Al-Nisa’: 58)

Dalam ayat tersebut diatas, di dalamnya terdapat perintah Allah yang ditujukan pada seorang pemimpin, yakni harus berbuat amanah dan adil. Amanah harus diwujudkan dengan mengayomi rakyat, dan memenuhi kebutuhan rakyat. Apa-apa yang diamanahkan rakyat adalah sebagai sesuatu yang dibutuhkan dan diharapkan oleh rakyat. Hal demikian karena pada dasarnya sebagai seorang pemimpin seharusnya menjadi pelayan rakyat dan bukan justru menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat. Sebagaimana hasil wawancara:

“Pemimpin yang amanah adalah pemimpin yang menepati janji-janji terbaiknya yang sudah disampaikan kepada seluruh rakyat sebelum akhirnya terpilih menjadi pemimpin. Rakyat memilih karena rakyat memberikan amanah, karena rakyat mengharapkan pemenuhan janji janji yang sudah disampaikan kepada rakyat”

Sebelum resmi menjadi seorang pemimpin negara, sudah sewajarnya pemimpin menyampaikan visi misi yang akan diwujudkannya selama menjadi kepala negara. Visi misi yang disampaikan diawal pada dasarnya menjadi janji yang ditunggu oleh rakyat untuk diwujudkan. Visi misi tersebut tentunya menyangkut khalayak umum, termasuk menyangkut dosen. Karenanya, pemimpin yang amanah, yang dapat dipegang janjinya oleh rakyat juga menjadi salah satu figur pemimpin yang diharapkan oleh dosen.

Pemimpin yang Bersikap Adil

Karakteristik kedua yang diidamkan rakyat adalah adil. Karakteristik adil dalam diri seorang pemimpin yakni pemimpin yang ikhlas, ikhlas semata-mata karena Allah dalam menjalankan tugas yang telah diamanahkan oleh rakyat. Ketika seorang pemimpin mampu memiliki sifat ikhlas dalam dirinya, maka akan mewujudkan suatu keadilan bagi rakyat. Artinya, pemimpin dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh rakyat akan menetapkan suatu hukum dengan seadil-adilnya.

Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang mampu menegakkan kebenaran setegaktegaknya sehingga tidak menghasilkan hukum yang berpihak. Dengan menegakkan hukum secara adil, maka pemimpin akan sangat dicintai oleh rakyatnya di semua kalangan. Pemimpin semacam inilah yang dirindukan oleh rakyat, termasuk diidamkan oleh dosen.

Pemimpin yang Mengedepankan Musyawarah (syura)

Musyawarah atau *syura* pada umumnya diartikan sebagai segala macam kegiatan yang mencakup segala bentuk pemberian advis (pendapat) dan bertukar pendapat. Dalam arti sempit *syura* berarti ketentuan yang harus ditetapkan sebagai hasil keputusan jamaah.

Musyawarah dalam diri pemimpin menjadi figur yang juga diharapkan oleh rakyat. Musyawarah diartikan dengan memperoleh kebaikan dengan jalan keputusan bersama. *Syuro'* memiliki makna musyawarah untuk menyelesaikan persoalan. Sehingga manakala terdapat suatu persoalan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, maka salah satu jalan yang harus ditempuh adalah melalui musyawarah. Musyawarah dianggap sebagai jalan yang tepat dalam menjalankan roda pemerintahan Islam yang berdasarkan pada al Qur'an dan hadits. Hal ini sebagaimana musyawarah untuk menentukan dan memutuskan sosok pemimpin (khalifah) pada masa pemerintahan Khulafaurrasyidin (Imran, 2015, p. 129).

Keputusan yang diperoleh melalui musyawarah adalah melalui interaksi antara pimpinan dan bawahan sehingga keputusan tidak hanya diperoleh dari satu pihak saja, melainkan dari berbagai pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini bukan berarti pemimpin harus selalu mendengarkan pendapat bawahannya, atau bawahan harus meng"iya"kan apa yang disampaikan atasan. Namun disini pemimpin harus memutuskan yang terbaik sesuai situasi dan kondisi pada saat yang dibutuhkan.

Melalui musyawarah akan menghasilkan keputusan yang tepat yang berguna untuk kemaslahatan dan kepentingan umat. Keputusan yang diperoleh dari hasil musyawarah akan lebih dapat diterima oleh berbagai pihak yang berkepentingan, sehingga tidak akan menimbulkan pertentangan antara satu dengan yang lainnya. Melalui musyawarah akan menghindarkan perilaku egois, dan individualistik. Hal ini karena keputusan yang diperoleh dari musyawarah harus dapat diterima oleh berbagai pihak sebagai hasil akhir. Sebagaimana tercantum dalam surat Al Imran ayat 159 yang artinya;

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya".

(Q.S. Ali Imran: 159)

Rakyat mempunyai peranan penting dalam *syura*, dalam asas *syura* eksistensi jamaah, hak-hak, dan pertanggungjawabannya diambil dari seluruh individu sebagai bagian darinya, pendapat jamaah merupakan pendapat keseluruhan dari mereka, sertakehendaknya yang kolektif juga tidak lain merupakan kehendak seluruh individu atau orang-orang yang *mukallaf* dari mereka. Secara garis besar prinsip *syura* memiliki pengertian bahwa setiap ketetapan yang ditentukan dalam

jamaah harus merupakan bukti dari kehendak *jumhuurul jama'ah* atau segenap individunya (Asy'ari, 1996), (Asy Syawi, 1997, p. 16). Pada esensinya jangkauan ruang lingkup musyawarah bukan hanya sekedar melakukan pemilihan umum yang bisa dilihat pada zaman sekarang. Jangkauannya jauh lebih luas dibandingkan dengan demokrasi yang tidak hanya pada mempersoalkan pemilihan pemimpin, akan tetapi juga berkaitan dengan persoalan-persoalan lainnya.

Musyawarah meliputi ketentuan yang harus ditegakkan dan dilaksanakan dalam urusan apapun, agama sudah menjelaskan dalam hidup bersama, mutlak perlu menegakkan musyawarah dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah bersama. Makin besar sesuatu kelompok maka semakin besar pula perlu ditegakkannya musyawarah. Oleh karenanya, pemimpin yang memutuskan suatu persoalan melalui musyawarah adalah sosok pemimpin yang juga menjadi figur pemimpin yang diharapkan oleh dosen IAIN Kudus.

Pemimpin yang Menegakkan Amr Ma'ruf Nahi Munkar

Figur keempat yang diharapkan ada dalam diri seorang pemimpin adalah memerintahkan pada perkara yang baik/ ma'ruf dan mencegah dari perkara yang buruk/ munkar. Antara maruf dan munkar, kedua perkara tersebut saling berdampingan antara satu dengan lainnya. Dengan berperilaku ma'ruf diharapkan seorang pemimpin akan terhindar dari perilaku yang munkar. Semakin banyak seseorang melakukan perbuatan yang ma'ruf, maka akan semakin meminimalisir pencegahan dari perkara yang munkar. Hal ini sebagaimana tercantum dalam surat al Imran 104 yang artinya:

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung". (Q.S. Ali Imran: 104)

Dan Q.S. Al-Taubah: 71 yang artinya;

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan RasulNya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (Q.S. Al-Taubah: 71)

Kedua ayat di atas dapat dipahami tentang perintah amar ma'ruf nahi munkar. Oleh karenanya, kita diperintahkan untuk taat pada pemimpin yang mengajak kepada kebaikan dan meninggalkan keburukan. Dan tidak diperintahkan bagi kita untuk taat dan patuh kepada pemimpin yang menyeru pada keburukan. Dengan tegaknya amar maruf nahi munkar, maka kedamaian akan terwujud dan rakyat akan merasakan kebahagiaan.

Pemimpin yang Mengayomi Rakyat

Figur lain yang diharapkan ada dalam diri seorang pemimpin adalah pemimpin yang dapat mengayomi, yakni memberikan pelayanan kepada rakyatnya, dan tidak berbuat dzalim kepada rakyat yang dipimpinnya. Pelayanan yang maksimal dari seorang pemimpin setidaknya memenuhi tiga aspek berikut;

Pertama, pelayanan dengan hati, artinya kepemimpinan seorang pemimpin orientasinya adalah benar-benar untuk memberikan pelayanan kepada rakyat, sehingga bukan semata-mata sekedar untuk memenuhi kepentingan pribadi ataupun golongannya. *Kedua*, seorang pemimpin harus memiliki cita-cita dan tujuan yang jelas yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat, sehingga seorang pemimpin harus memiliki sikap tanggap dalam menghadapi setiap problem yang dihadapi, dan mewujudkan harapan dan kebutuhan rakyat. Dengan sikap responsif dan tanggap dari seorang pemimpin untuk memberikan pelayanan pada umat, maka akan terwujud kesejahteraan rakyat, sehingga rakyat merasakan kepuasan. *Ketiga*, pemimpin yang peduli akan urusan akhirat, yakni pemimpin yang tidak hanya memikirkan kesuksesan urusan dunia semata, melainkan juga fokus pada aspek spiritual. Melalui aspek ini, seorang pemimpin akan memiliki komitmen untuk menyeleksi dan menyeimbangkan antara urusan ibadah dan urusan dunia yakni melayani umat dengan sebaik-baiknya.

Sebagaimana di contohkan oleh khalifah Umar Bin Khattab ra yang langsung bersikap tanggap ketika mengetahui penderitaan yang dialami rakyatnya, dosen juga mengharapkan sosok pemimpin yang juga peduli dan mengayomi rakyat yang dipimpinnya, dalam hal ini adalah rakyat kecil yang kurang begitu mendapatkan perhatian. Karena bagaimanapun juga, seorang pemimpin pada akhirnya akan dimintai pertanggung jawabannya terhadap kepemimpinannya, terutama terkait kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya.

Pemimpin yang Menyediakan Lapangan Pekerjaan

Lapangan kerja dapat diartikan sebagai tersedianya lapangan pekerjaan. Di dalam lapangan kerja terdapat kegiatan usaha yang dapat dimanfaatkan seseorang dengan memperoleh rupiah untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Terbukanya lapangan pekerjaan menjadi harapan yang dinantikan masyarakat agar segera terwujud. Tersedianya lapangan pekerjaan berkaitan erat dengan kebijakan pemerintah dalam mewujudkannya. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui ketersediaan lapangan pekerjaan. Dengan tersedianya lapangan pekerjaan maka pertumbuhan ekonomi masyarakat semakin membaik, namun demikian ketersediaan lapangan pekerjaan juga harus diimbangi adanya kemudahan bagi masyarakat untuk mengaksesnya sehingga akan dapat meminimalisir pengangguran yang menjadikan kesengsaraan bagi rakyat.

Dalam upaya menampung tenaga kerja yang semakin hari semakin bertambah, maka ketersediaan dan kemudahan dalam mengakses lapangan kerja harus dibuka seluas-luasnya.

Dengan kemudahan mengakses lapangan pekerjaan, maka tidak akan menimbulkan kesulitan bagi mereka yang berupaya mengakses pekerjaan. Sebagaimana hasil wawancara:

“Pemimpin yang ideal yang diharapkan rakyat setidaknya ia menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya untuk warga negara Indonesia sendiri dari berbagai kalangan, sehingga hal ini dapat mengurangi jumlah pengangguran yang semakin bertambah dari berbagai lulusan”.

Pemimpin yang memperhatikan ketersediaan lapangan kerja sangat lah diharapkan oleh dosen untuk dijadikan sebagai seorang pemimpin negara. Semakin bertambahnya lulusan perguruan tinggi seharusnya juga diimbangi dengan terbukanya lapangan pekerjaan, sehingga bukan malah menambah jumlah pengangguran. Disamping itu, dosen juga berharap agar pemerintah tidak hanya sebatas mempersiapkan lapangan pekerjaan bagi lulusan Perguruan Tinggi, tapi juga bagi siapapun yang membutuhkan pekerjaan.

Pemimpin yang Memperhatikan Kesejahteraan Guru Honorer

Guru adalah sosok pahlawan tanpa tanda jasa dengan tugas utamanya memberikan pendidikan dan menanamkan akhlak dan adab pada peserta didik. Oleh karenanya, atas apa yang telah diberikan guru untuk pendidikan, maka kesejahteraannya pun harus diperhatikan. Sangat disayangkan ketika guru tidak memiliki kesejahteraan yang layak sebagaimana mestinya, sebagaimana dialami oleh guru honorer. Kesejahteraan guru honorer menjadi permasalahan pelik yang sampai saat ini belum ada titik penyelesaiannya.

Kondisi memilukan yang dialami guru yang hanya dianggap sebagai buruh/ kacang dalam bidang pendidikan. Gaji yang diterima guru dalam setiap bulannya sangatlah jauh dari kata layak. Tugas utamanya mendidik generasi penerus bangsa adalah tugas yang sangat berat, namun beratnya tugas tersebut tidak diimbangi dengan kesejahteraan guru honorer terkait gaji yang diterimanya. Artinya, hak yang mereka terima sangatlah berbanding terbalik dengan kewajiban yang harus mereka penuhi. Hal ini tentunya sangat jauh berbeda dengan hak yang diterima oleh guru yang sudah berstatus PNS. Meskipun tugas dan tanggung jawab antara guru honorer dan guru PNS sama-sama berat, dan bahkan lebih berat dari guru honorer, namun guru PNS memiliki kesejahteraan yang jauh lebih layak dari pada guru honorer. Kesenjangan diantara guru honorer dan guru PNS tersebut yang pada akhirnya menimbulkan kecemburuan sosial dalam tatanan masyarakat. Pada dasarnya kebijakan yang diharapkan guru honorer adalah tidak adanya pembeda status antara guru honorer dan guru PNS. Seharusnya, yang lebih diprioritaskan adalah wujud kebaktian dan pengabdiaannya pada negara, yakni untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa.

Guru dan dosen adalah dua profesi yang berkecimpung dalam bidang yang sama, yakni bidang pendidikan. Keduanya memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk mendidik generasi penerus bangsa agar memiliki akhlak dan moral yang baik. Apa yang dialami oleh guru honorer, pada dasarnya juga dirasakan oleh dosen. Terutama terkait dengan kesejahteraan guru honorer.

Meskipun tidak secara langsung merasakan apa yang dialami oleh guru honorer, dosen memiliki rasa empati dan iba yang begitu tinggi terhadap kesejahteraan dosen. Karenanya, salah satu figur pemimpin ideal yang menjadi prioritas bagi dosen adalah pemimpin yang juga memperhatikan kesejahteraan guru honorer.

Pemimpin yang Bijak Terkait Aturan Finger Print

Aturan terkait *finger print* menjadi aturan yang cukup memberatkan beberapa dosen di Perguruan Tinggi, khususnya bagi dosen PNS. Hal tersebut karena kedisiplinan dosen salah satunya diukur dari rekaman kehadirannya di *finger print*. Aturan *finger print* mengharuskan dosen PNS melakukan absensi secara elektronik baik saat hadir atau pulang.

Adapun beberapa konsekuensi yang ditimbulkan dengan adanya aturan/ kebijakan *finger print* adalah sebagai berikut: a) Kebijakan terkait TuKin dan uang makan; b) Keleluasaan dalam mengikuti forum pertemuan ilmiah di luar kampus; c) Keleluasaan terkait Karya ilmiah hasil penelitian; d) Keterkaitan dengan akreditasi institusi.

Selain dampak tersebut diatas, bagi dosen yang memiliki tempat tinggal yang jauh dari tempat bekerja, tentunya aturan *finger print* juga menjadi momok tersendiri. Mereka harus sudah *stand by* di kampus pukul 07.30 WIB, sedangkan perjalanan yang harus mereka tempuh menuju tempat tujuan terkadang terdapat kendala yang diluar perkiraan. Meskipun aturan *finger print* juga tertera dalam PMA RI nomor 5 Tahun 2017 Tentang Jam Kerja Dosen Pada Perguruan Tinggi Keagamaan, yakni dalam pasal 4 (1), bahwa;

Dosen wajib mengisi daftar hadir pada setiap kegiatan yang berupa pengajaran, pembimbingan, dan pengujian (2) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat hadir dan pulang secara elektronik.

1. Ketentuan jumlah jam yang wajib dipenuhi dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni sebagai berikut:
2. Bagi Dosen dengan jabatan fungsional Asisten Ahli ~ (lebih besar atau sama dengan) 21 (dua puluh satu) jam per minggu;
3. Bagi Dosen dengan jabatan fungsional Lektor > (lebih besar atau sama dengan) 17 (tujuh belas) jam per minggu;
4. Bagi Dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala ~ (lebih besar atau sama dengan) 13 (tiga belas) jam per minggu; dan
5. Bagi Dosen dengan jabatan fungsional Profesor :.".. (lebih besar a tau sama dengan) 9 (sembilan) jam per minggu.

Namun, pada kenyataannya aturan dalam PMA tersebut belum dapat terrealisasikan di beberapa kampus sebagaimana yang diharapkan oleh kalangan dosen. Dari berbagai pertimbangan

terkait kebijakan *finger print* tersebut, kalangan dosen menghendaki pemimpin negara yang lebih memperhatikan dan memberikan kemudahan bagi para dosen, sehingga dosen bisa lebih leluasa untuk mengembangkan keilmuannya.

Simpulan

Menegakkan hukum Allah di bumi merupakan suatu amanah yang harus diwujudkan dan dipertanggungjawabkan. Dalam mewujudkan hukum tersebut maka dibutuhkan sosok pemimpin yang juga mentaati Allah dan Rasulnya, yakni yang menegakkan hukum-hukum dan aturan yang telah ditetapkannya dan sekaligus menjauhi segala larangannya. Hal tersebut agar terciptanya kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Dalam praktiknya, pemimpin yang ideal harus mengacu pada sumber hukum yang utama, yakni Al Qur'an dan Hadits. Karenanya, untuk mewujudkan Islam yang sempurna, maka diperlukan pemimpin yang ideal.

Dari apa yang telah peneliti paparkan di atas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwasannya figur pemimpin ideal dalam Islam perspektif dosen IAIN Kudus adalah pemimpin yang amanah, pemimpin yang bersikap adil, pemimpin yang mengedepankan musyawarah (*syura*), pemimpin yang menegakkan *amr ma'ruf nahi munkar*, mengayomi rakyat, pemimpin yang menyediakan lapangan pekerjaan, pemimpin yang memperhatikan kesejahteraan guru honorer, pemimpin yang bijak terkait aturan *finger print*.

Daftar Pustaka

- Asy Syawi, T. M. (1997). *Fiqhusy – Syura Wal Istisyarat* (P. Djamaludin, ed.). Jakarta: Gema Insani Press.
- Asy'ari, Z. H. (1996). *Moralitas Pendidikan Pesantren*. Yogyakarta: LKPSM.
- Ghazali, D. A., & Gunawan, H. (2015). *Studi Islam: Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Interdisipliner*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Harfin Zuhdi, M. (2014). Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, 19(1).
- Imran, M. (2015). Sistem Syuro' Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Islam. *Jurnal IUS: Kajian Hukum Dan Keadilan*, 3(7).
- Nata, A. (20014). *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sholikin, A. (2012). Pemikiran Politik Negara Dan Agama “Ahmad Syafii Maarif. *Jurnal Politik Muda*, 2(1).
- Syaminan, M. (2009). Analisa Pemikiran Politik Islam. *Jurnal Politeia*, 1(1).